

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN
HUBUNGANNYA DENGAN BELANJA MODAL
PROVINSI JAMBI 2001 - 2012**

Rafniati¹⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi

ABSTRACT

*Abstract- The study entitled *An Analysis of Regional Desentralization level and Financial Performance, and it's Correlation toward Capital Expenditure of Jambi Province 2001-2012*. There are three aims of this thesis, they are : first, to analyze the regional desentralization level of Jambi Province ; second, to analyze the financial performance of Jambi Province ; third, to analyze the correlation between desentralization level and financial performance toward capital expenditure of Jambi Province 2001-2012. Due to the methodology of research, this thesis used descriptive quantitative method within 3 research instruments ; the regional desentralization rasio, financial performance rasio and corelation. The result of this research has concluded that first, the level of regional desentralization level of Jambi Province was in sufficient category. Second the regional financial performance of Jambi performance was in very effective category, however inefficient. Meanwhile the level of regional tax effort was still low. Third, it was found that there was no significant corelation between regional desentralization level and regional financial performance.*

Keyword : regional desentralization level and regional financial performance.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998, telah berdampak pada percepatan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekwen. Sebagai konsekwensinya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diubah dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004

Kedua Undang-Undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, sehingga tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak, seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000: 49) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah diawali dengan tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good Government*). Guna mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor Publik. *New Public Management* (NPM) merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktek manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktek manajemen pada sektor publik. Untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi praktek dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (*Compulsory Competitive Tendering- CCT*), dan privatisasi perusahaan publik (Hughes, 1998; Jackson, 1995; Broadbent & Guthrie, 1992).

Penerapan konsep *New Public Management* telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hirarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Hughes, 1998).

Konsep New Publik Manajemen berfokus pada kinerja, bukan pada kebijakan yang membawa konsekwensi pada perubahan pendekatan anggaran dari tradisional (*Traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*) menuntut daerah untuk melakukan efisiensi, optimalisasi pendapatan, pemangkasan biaya (*cost cutting*) dan kompetisi tender.

Pembaharuan tentang pengelolaan keuangan daerah di tandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditindak lanjuti dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab membutuhkan pembiayaan yang besar. Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamuji dalam Kaho (1998 : 124) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif, dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah perlu kepastian sumber pendapatan. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Dearah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis,efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermance governance*), penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didukung sistem akuntabilitas kinerja yang memadai.

Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih memprihatinkan, hal ini disebabkan anggaran

daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disamping itu banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisien dan efektif, karena kualitas perencanaan anggaran daerah yang relatif lemah.

Musgrave dan Musgrave (1993: 6 – 13) mengemukakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Tatanan pemerintahan yang mengarah pada diperluasnya otonomi daerah, menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pemerintahan di daerah menurut prakrsa dan aspirasi masyarakat. Untuk mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, yang harus dilakukan daerah adalah dengan memperkuat struktur perekonomiannya sehingga pemerintah daerah harus dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, Halim (2001 :167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

PAD merupakan pendapatan murni yang dikelola daerah itu sendiri, potensi yang dimiliki berada di daerah yang digali oleh prioritas daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan belanja daerah atau usaha memperkecil ketergantungan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Mangkusubroto, 1994). Upaya peningkatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik,2002) Otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki. Alokasi berbagai penerimaan PAD menjadi faktor penting dalam peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan diberbagai sektor terutama sektor publik. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi,2007).

Disadari bahwa sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi karena Derajat Desentralisasinya Fiskal yang dimiliki masih rendah. Akibatnya kemandirian keuangan daerah juga rendah dan akhirnya pemerintah daerah menjadi tidak mandiri atau ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi tinggi.

Tabel. 1
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal
Pemerintah Provinsi Jambi 2008 -2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kategori
2008	454.441.987.000,-	1.261.469.133.000,-	36,02	Cukup
2009	498.167.990.000,-	1.292.670.700.000,-	38,54	Cukup
2010	686.629.000.000,-	1.820.465.000.000,-	37,72	Cukup
2011	984.232.579.912,-	2.078.806.913.790,-	47,34	Cukup
2012	995.467.276.256,-	2.662.866.047.836,-	37,38	Cukup
Rata-rata			39,40	Cukup

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal selama 5 (lima) tahun terakhir

baik secara rata-rata maupun pertahun masih berada pada kategori cukup. Ini berarti kinerja keuangan Provinsi Jambi masih belum optimal.

Dari sudut lain, penerapan NPM pada pemerintah daerah menimbulkan keharusan bagi pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur untuk melayani kebutuhan masyarakat. Infrastruktur tersebut tentu sebaiknya dibiayai dari penerimaan daerah yang berasal dari PAD. Secara akuntansi,

pemerintah daerah membiayai infrastruktur tersebut dikategorikan belanja modal. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk belanja infrastruktur merupakan komponen investasi daerah. Investasi daerah yang kategori belanja modal diharapkan akan menghasilkan penerimaan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Ini berarti capaian kemandirian keuangan membiayai belanja modal.

Tabel. 2
Perolehan PAD, Pengeluaran Daerah dan Belanja Modal

Tahun	Perolehan PAD	Belanja Daerah	Belanja Modal
2008	454.441.987.000,-	1.615.956.992.043,-	608.700.849.540,-
2009	498.167.990.389,-	1.670.048.305.683,-	483.926.717.838,-
2010	602.355.302.000,-	1.488.130.350.003,-	465.860.321.003,-
2011	984.232.579.912,-	1.750.241.856.160,-	518.750.581.050,-
2012	995.467.276.256,-	2.558.458.187.655,-	682.766.683.874,-

Sumber :Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa PAD Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. begitu juga dengan Belanja Daerah. Peningkatan penerimaan PAD tahun 2011 dan 2012 memberikan dampak terhadap peningkatan alokasi untuk belanja modal. Ada tendensius, belanja modal tersebut membiayai investasi sektor publik sehingga akan dapat mendorong peningkatan PAD yang akhirnya meningkatkan pula Derajat Desentralisasi Fiskal sebagai wujud kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi.

Penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemandirian dan kinerja keuangan daerah dan hubungannya dengan belanja modal sudah banyak dilakukan Sebagai pembanding perlu dikemukakan hasil penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian tersebut seperti dikemukakan berikut ini :

Adi (2007) dalam penelitiannya menggunakan variable kinerja keuangan yaitu share PAD, Growth PAD dan Elastisitas yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PAD, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan peran PAD terhadap belanja. Terdapat indikasi masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Azhar (2008) melakukan analisis terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah kab/kota sebelum dan sesudah otonomi daerah, mendapatkan hasil bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan

pertumbuhan PAD, tetapi tidak diikuti tingkat pembiayaan daerah. Ketergantungan dari pemerintah pusat yang cukup tinggi dan tekanan keuangan yang menyebabkan kinerja pemerintahan bergeser dan naik turun. Selain itu akibat terjadinya pemekaran di kab/kota pada era setelah otonomi diberlakukan, maka banyak daerah yang mengalami penurunan anggaran dan penurunan pendapatan asli daerah akibat semakin kecil wilayah yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota.

Susilo & Hariadi (2009) menggunakan variabel kinerja dengan dua rasio yaitu : Rasio kemandirian daerah dan rasio aktivitas yang terdiri dari rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD. Hasil yang diperoleh adalah tingkat kemandirian daerah setelah otonomi tidak lebih dari pada sebelum otonomi dan tingkat aktivitas belanja pembangunan setelah otonomi tidak lebih baik dibandingkan sebelum otonomi.

Penelitian Sukadana (2010) yang menggunakan pendekatan analisis kontribusi, analisis efektifitas, analisis derajat desentralisasi fiskal dan analisis trend linear. Dari Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah kabupaten Klungkung masih sangat rendah karenanya pembiayaan dari pemerintah pusat masih dominan dan Derajat Desentralisasi Fiskalnya termasuk klasifikasi sangat kurang.

Sularso dkk (2011) membahas mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi,

menemukan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan.

Batafor (2011) menggunakan variabel Kinerja keuangan dengan rasio efisiensi dan efektifitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap variabel-variabel di atas diperoleh hasil: Bahwa tingkat kemandirian keuangan, tingkat efektifitas, tingkat keserasian belanja di periode II semakin meningkat dibanding dengan periode I. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada periode I lebih efisien dibandingkan dengan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada periode II. Hasil dari variabel Kesejahteraan diperoleh hasil bahwa tingkat penadapatn, tingkat pendidikan, harapan hidup meningkat di periode II dibandingkan dengan periode I (terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada periode II).

Peneliti lain tentang Kinerja Keuangan daerah dan Belanja Modal adalah Sularso dan Restianto (2011) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel belanja modal berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan dan secara signifikan berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui PAD.

Nugroho dkk (2012) meneliti pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening menemukan bahwa Belanja Modal secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dan Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah.

Iktisar hasil penelitian dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan kinerja Keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan nama Peneliti	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi dan relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi Oleh: Priyo Hari Adi (2007)	Kinerja Keuangan dengan ukuran share, growth,elastisitas, IKK dalam 3 kategori dan pertumbuhan ekonomi	Secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PAD, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan peran (share) PAD terhadap belanja, dan terdapat indikasi masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2.	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kab./kota sebelum dan sesudah otonomi daerah oleh : Mhd Karya Satya Azhar (2008).	Kinerja keuangan dengan : desentralisasi fiskal,upaya fiskal, kemampuan pembiayaan, Rasio Efisiensi penggunaan anggaran	Secara umum keberadaan perbedaan-perbedaan dalam pencapaian kinerja seblum dan sesudah otonomi: Kinerja yang diukur lewat desentralisasi fiskal, dan tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan namun, namun untuk tingkat efisensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan
3.	I. GEDE SUKADANA (2010) Analisis Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah di Kabupaten Klungkung	analisis kontribusi, analisis efektifitas, analisis derajat desentralisasi fiskal dan analisis trend linear	Dari Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penegeluaran daerah kabupaten Klungkung masih sangat rendah karenanya pembiayaan dari pemerintah pusat masih dominan dan Derajat Desentralisasi Fiskalnya termasuk klasifikasi sangat kurang.
4.	Evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupataen Lembata Provinsi NTT Oleh: Gregorius Gehi Batafor (2011).	1.Kinerja keuangan dangan Rasio : Efisiensi dan efektifitas 2. Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat kemandirian keuangan, Tkt. efektifitas, Tkt.Efisiensi dan tingkat keserasian belanja pada periode II mengalami peningkatan dibanding perode I.Tkt. Pendapatan, tkt pendidikan dan harapan hid up meningkat pada periode II dibandingkan periode I (terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada periode I dan II.
5.	Analisis kinerja keuaagan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah (studi empiris di Prop. Jawa Tengah oleh: Gideo Tri Budi Susilo dan Priyo Hariadi (2009).	1.Rasio kemandirian daerah. 2. Rasio Aktifitas yang terdiri dari Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja pembangunan terhadap APBD.	Tkt. Kemandirian daerah stlh otonomi tdk lbh baik dr sbml otonomi dan tkt aktivitas belanja pemb.stlh otonomi tdk lebih dibandingkan sebelum otonomi.

6.	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Jawa Tengah oleh Havid Sularso dan Yanuar E. Ristiano (2011)	Kinerja keuangan Belanja Modal Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi	Derajat Desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli sebagai Variabel Intervening oleh Fajar Nugroho dan Abdul Rahman (2012)	Pertumbuhan Kinerja keuangan daerah, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah.	Belanja Modal secara signifikan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan dan belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui PAD.

Dari beberapa hasil penelitian diatas menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemandirian dan kinerja keuangan daerah serta hubungannya dengan belanja modal. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penelitian ini terutama kaitannya dengan penentuan alat analisis dan pemecahan masalah yang telah dilakukan. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini adalah objek penelitian adalah pemerintah Provinsi Jambi dengan data time series 2001 – 2012.

Mengkaji dan menganalisis lebih lanjut masalah tingkat kemandirian dan kinerja keuangan daerah khususnya Provinsi Jambi maka perlu dituangkan kedalam suatu penelitian. Penelitian tersebut berjudul: “Analisis Tingkat Kemandirian dan Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Belanja Modal Provinsi Jambi”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang melatar belakangi penelitian ini dapat diformulasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi?
2. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi?
3. Bagaimanakah Hubungan antara Tingkat Kemandirian dan Kinerja Keuangan daerah dengan Belanja Modal Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi
2. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
3. Untuk menganalisis hubungan antara Tingkat Kemandirian dan Kinerja Keuangan daerah dengan Belanja Modal Provinsi Jambi.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

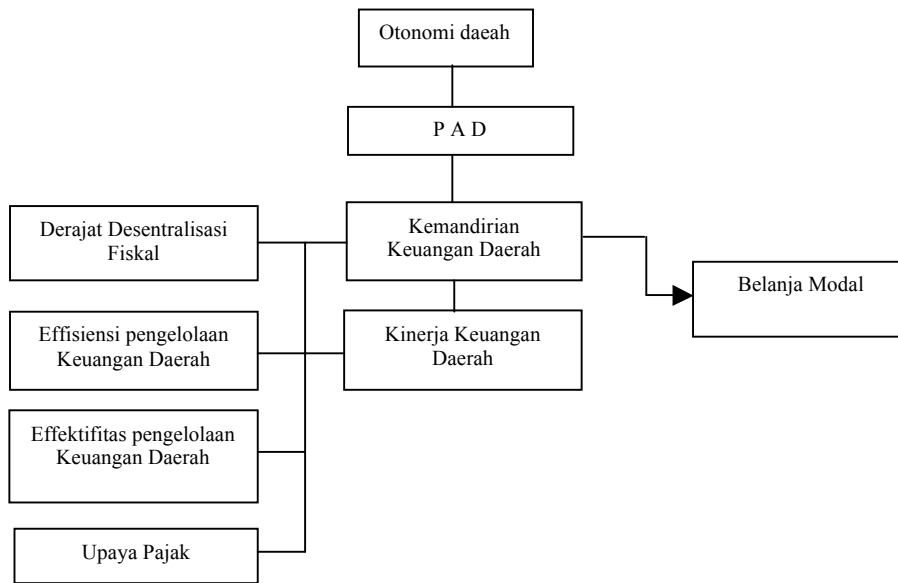
Pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti oleh desentralisasi fiskal menuntut pemerintah harus kreatif mencari sumber-sumber penerimaan daerah. Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan

melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Daerah serta Pendapatan lainnya yang sah. Khusus untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkaitan dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari tingkatan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Makin tinggi DDF, maka pemerintah daerah semakin mandiri dalam keuangan daerah tetapi sebaliknya, DDF yang rendah akan menyebabkan pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Belanja modal yang berupa investasi pada sektor publik akan mendorong peningkatan penerimaan PAD. Pengeluaran dalam belanja modal tersebut akan mendorong meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Belanja modal yang bernilai guna bagi masyarakat akan mendorong PAD meningkat melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah. Berarti terdapat hubungan kausalitas antara peningkatan DDF sebagai upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal.

Visualisasi dari alur pikiran tentang kemandirian dan kinerja keuangan daerah dan hubungannya dengan belanja modal dapat dituangkan kedalam skema kerangka alur pikir. Skema tersebut disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar. 1
Kerangka Pemikiran



3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi

- Derajat Desentralisasi Fiskal

Analisis tingkat kemandirian keuangan pemerintah provinsi Jambi bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bisa memperlihatkan tingkat kemandirian pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah provinsi Jambi dalam melaksanakan kinerja keuangannya sesuai dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Untuk menganalisis Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan perhitungan : Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah.

$$DDF = \text{PAD} / \text{TPD} \times 100 \%$$

Pada tabel 4 dan grafik gambar 2 terlihat bahwa sejak tahun 2001-2012 persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2001 – 2004, persentase PAD terhadap TPD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2005–2009 persentase PAD terhadap TPD cenderung menurun. Persentase PAD terhadap TPD yang terbaik sepanjang dua belas tahun terakhir terjadi pada tahun 2004, 2005 dan 2011. Pada tahun tersebut PAD memberikan kontribusi terhadap TPD masing-masing sebesar 46,06 persen dan 46,66 persen dan 47,34 persen.

Tabel. 4
Perkembangan Derajat Desentralisasi Berdasarkan Rasio PAD terhadap TPD Provinsi Jambi Tahun 2001-2012

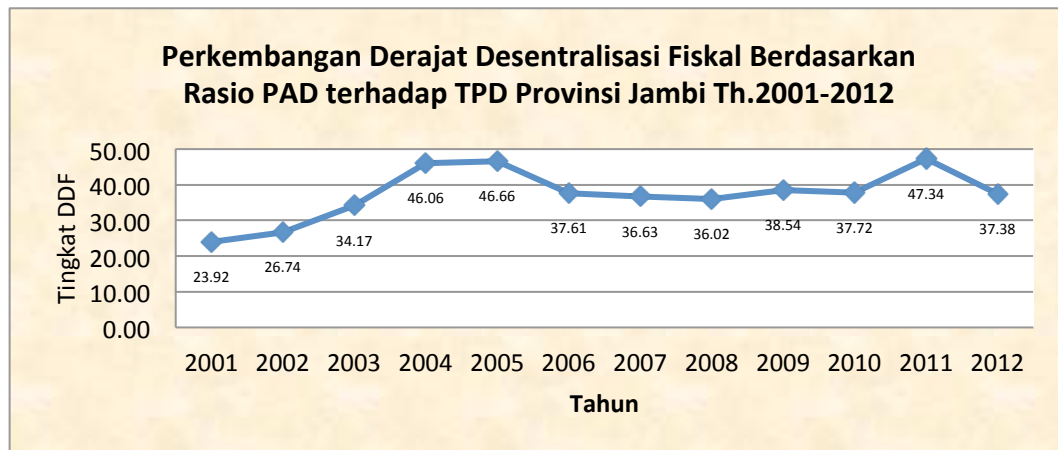
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kategori
2001	65.460.731.000,-	273.678.177.000,-	23,92	Sedang
2002	111.000.834.000,-	415.163.426.000,-	26,74	Sedang
2003	187.639.300.000,-	549.061.761.000,-	34,17	Cukup
2004	246.236.225.000,-	534.655.483.000,-	46,06	Baik
2005	283.589.737.000,-	607.839.484.000,-	46,66	Baik
2006	336.590.283.000,-	894.925.322.000,-	37,61	Cukup
2007	382.082.234.000,-	1.043.015.234.000,-	36,63	Cukup
2008	454.441.987.000,-	1.261.469.133.000,-	36,02	Cukup
2009	498.167.990.000,-	1.292.670.700.000,-	38,54	Cukup
2010	686.629.000.000,-	1.820.465.000.000,-	37,72	Cukup
2011	984.232.579.912,-	2.078.806.913.790,-	47,34	Cukup
2012	995.467.276.256,-	2.662.866.047.836,-	37,38	Cukup
Rata-rata			37,40	Cukup

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)

Untuk tahun 2001 dan 2002, persentase PAD terhadap TPD masih rendah yaitu hanya di bawah 30 persen. Sementara untuk tahun 2003 dan 2006-2012, sudah termasuk kategori baik karena persentase PAD terhadap TPD berkisar 34-38 persen. Jika kita amati, setiap tahun PAD mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2010 peningkatan PAD hampir mencapai 38 persen

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak membuat persentase PAD terhadap TPD menjadi besar karena sumber dari dana perimbangan dan pendapatan lain-lain juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun tersebut. Total pendapatan daerah sendiri pada tahun tersebut meningkat hampir 27 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar. 2
Perkembangan Derajat Desentralisasi Berdasarkan Rasio PAD terhadap TPD
Provinsi Jambi Tahun 2001-2012



Selama periode 2001 -2012 secara rata-rata derajat desentralisasi fiskal provinsi Jambi hanya 37,40% (kategori cukup). Dikatakan cukup karena koefisien nya berada dibawah angka 40,00% - 50,00% (kategori baik). Rendahnya koefisien ini disebabkan Rendahnya Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan.

Radianto (1997) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa peran pemerintah pusat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah/derajat otonomi fiskal daerah.

Tabel 5 memperlihatkan kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah TPD tahun 2001 – 2012 rata-rata 37,74 persen dan apabila dilihat pertahun kontribusinya mengalami fluktuasi. Kisaran kontribusi PAD terhadap TPD sepanjang tahun 2001 – 2012 adalah antara 23 – 47 persen. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu

47,34 persen. Kontribusi PAD yang tertinggi di tahun 2011 terjadi karena perolehan PAD juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara untuk Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sejak tahun 2001 – 2012 memberikan kontribusi rata-rata 48,94 persen terhadap total Pendapatan Daerah. Kisaran kontribusi dana perimbangan terhadap TPD sepanjang tahun 2001 -2012 adalah antara 38 – 63 persen. Ini mendakan bahwa ketergantungan provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah masih cukup tinggi. Perlu adanya upaya dari pemerintah provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan PAD yang disesuaikan dengan kapasitas dan potensi yang ada di Provinsi Jambi yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Tabel. 5
Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2001-2012 (dalam rupiah)

Tahun	PAD			Dana Perimbangan			Pendapatan lain-lain			Total Pendapatan	Pertmb (%)
	Nilai (Rp)	Pertumb. (%)	Kont. (%)	Nilai (Rp)	Pertumb. (%)	Kont. (%)	Nilai (Rp)	Pertumb. (%)	Kont. (%)		
2001	65.460.731.000,-	-	23,90	173.882.792.000,-	-	63,54	34.334.656.000,-	-	12,55	273.678.179.000,-	-
2002	111.000.834.000,-	69,57	26,74	237.453.112.000,-	36,56	57,20	66.709.481.000,-	94,29	16,07	415.163.427.000,-	51,7
2003	187.639.300.000,-	69,04	34,18	266.403.018.000,-	12,19	48,52	95.019.443.000,-	42,44	17,31	549.061.761.000,-	32,25
2004	246.236.225.000,-	31,23	46,01	279.894.258.000,-	5,06	52,35	8.525.000.000,-	-91,03	1,59	534.655.483.000,-	-2,62
2005	283.589.737.000,-	15,17	46,66	311.479.747.000,-	11,28	51,24	12.770.000.000,-	49,79	2,10	607.839.484.000,-	13,69
2006	336.590.283.000,-	18,69	37,61	532.035.039.000,-	70,81	59,45	26.300.000.000,-	105,95	2,94	894.925.322.000,-	47,23
2007	382.082.234.000,-	13,52	36,63	631.433.000.000,-	18,68	60,54	29.500.000.000,-	12,17	2,83	1.043.015.234.000,-	16,55
2008	454.441.987.000,-	18,94	36,02	748.327.682.000,-	18,51	59,32	58.699.464.000,-	98,98	4,65	1.261.469.133.000,-	20,94
2009	498.167.990.000,-	9,62	38,54	769.453.510.000,-	2,82	59,52	25.049.200.000,-	-57,33	1,94	1.292.670.700.000,-	2,47
2010	686.629.362.314,-	37,83	41,86	932.205.659.790,-	21,15	56,84	213.508.355.800,-	704,94	13,02	1.820.465.857.679,-	26,88
2011	984.232.579.912,-	69,76	47,34	827.820.000.000,-	-11,26	39,82	314.015.000.000,-	67,99	15,10	2.078.866.047.836,-	87,57
2012	995.467.276.256,-	98,87	37,38	1.019.543.000.000,-	81,19	38,29	647.855.771.580,-	48,46	24,32	2.662.866.047.836,-	78,07
Rata-rata	-	37,69	37,74	-	22,25	48,94	-	90,14	9,54	-	31,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Jambi dan Dinas Pendapatan Daerah Jambi

Menurut BPS (2004), ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya PAD terhadap total belanja yaitu:

1. Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah akan tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah.
2. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita.
3. Kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

3.2 Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jambi

3.2.1 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan pemerintah daerah dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam implementasinya, pemerintah sering menggunakan rumus efektivitas yaitu membandingkan antara realisasi dengan anggaran PAD karena dengan rumus itu nilai efektivitas biasanya termasuk kategori cukup efektif atau bahkan sering mendapat kriteria sangat efektif. Dengan anggaran yang terlalu rendah berarti realisasi PAD dapat dengan mudah dicapai tanpa kesulitan sehingga indikator efektivitas menjadi tidak bermanfaat atau tidak dapat dijadikan informasi untuk membuat perencanaan berikutnya. Biasanya Dinas Pendapatan Daerah melakukan estimasi berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya yang kemudian selalu dinaikkan dengan persentase

tertentu (misalnya 5 persen). Teknik perhitungan seperti ini mengabaikan potensi pajak yang sebenarnya (Tan, 2010)

Agar anggaran PAD yang ditetapkan lebih sesuai dengan kondisi riil yang ada di propinsi Jambi, maka sebaiknya pada saat penetapan anggaran dihitung potensi PAD yang dimiliki oleh provinsi Jambi. Oleh karena itu perhitungan tingkat efektivitas PAD yang lebih tepat digunakan yaitu (Tan, 2010) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100\%$$

Dengan pengukuran seperti tersebut di atas sudah dapat diperkirakan amat sulit untuk mencapai 100 persen yang berarti realisasi sama dengan potensi. Dalam perencanaan jika realisasi sudah mencapai 80 persen sudah dapat memberikan suatu gambaran keberhasilan pemerintah menggali potensi PAD tersebut. Tentu semakin mendekati potensi menunjukkan keberhasilan pemerintah merancang dan menghasilkan penerimaan PAD (Tan, 2010).

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keuangan pemerintah provinsi Jambi mengalami fluktuasi namun memiliki kecenderungan meningkat. Dari tahun 2001 – 2012 efektivitas keuangan daerah provinsi Jambi sudah sangat efektif karena koefisiennya berada di atas angka 100 persen, Hal ini berarti bahwa pemerintah provinsi Jambi telah berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah dan pendapatan non asli daerah seperti dana perimbangan pemerintah pusat dan provinsi melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan keuangan lainnya.

Realisasi pendapatan tersebut melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk

memperoleh pendapatan.

Tabel. 6
Rasio Efektivitas Keuangan Provinsi Jambi
Tahun 2001-2012

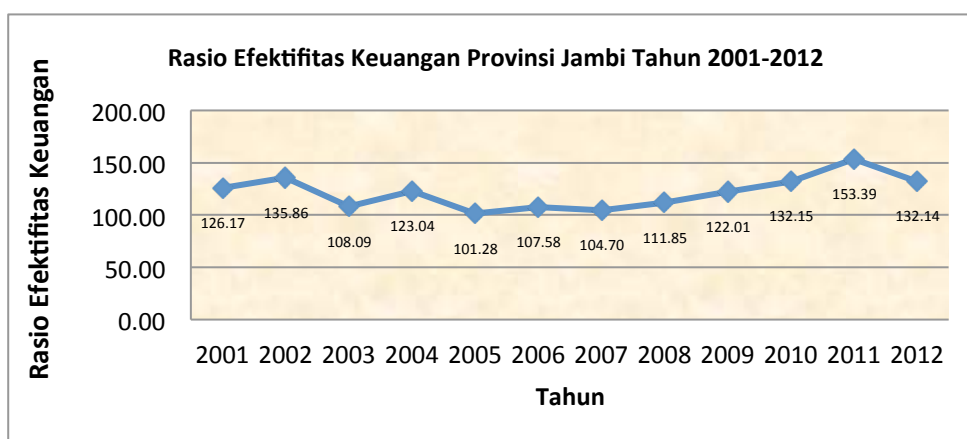
Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Efektivitas Keuangan	Kategori
2001	51.882.669.000,-	65.460.731.932,-	126,17	Sangat Efektif
2002	81.704.429.000,-	111.000.834.369,-	135,86	Sangat Efektif
2003	172.303.467.000,-	187.639.300.115,-	108,90	Sangat Efektif
2004	200.123.175.716,-	246.236.225.716,-	123,04	Sangat Efektif
2005	279.997.834.270,-	283.589.737.270,-	101,28	Sangat Efektif
2006	312.884.335.586,-	336.590.283.408,-	107,58	Sangat Efektif
2007	364.927.123.540,-	382.082.234.637,-	104,70	Sangat Efektif
2008	406.306.854.595,-	454.441.987.272,-	111,85	Sangat Efektif
2009	408.309.785.000,-	498.167.990.389,-	122,01	Sangat Efektif
2010	455.795.726.000,-	602.355.302.089,-	132,15	Sangat Efektif
2011	641.658.215.660,-	984.232.579.912,-	153,39	Sangat efektif
2012	753.366.207.083,-	995.467.276.256,-	132,14	Sangat efektif
Rata-rata			121,58	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)

Rasio efektifitas tertinggi terjadi di tahun 2011 dimana pemerintah daerah provinsi Jambi mampu mencapai sebesar 153,39 persen dari anggaran yang ditetapkan, dan secara rata-rata rasio efektifitas mencapai 121,58 persen. Grafik 4.2 memperlihatkan perkembangan rasio efektifitas keuangan provinsi Jambi selama 12 tahun. Dari grafik diatas dapat terlihat selama periode waktu 2001 – 2012 Provinsi Jambi selalu berhasil

merealisasikan penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi. *Pertama*, pemerintah provinsi Jambi memang telah bekerja keras untuk dapat merealisasikan anggaran PAD yang telah ditetapkan setiap tahunnya agar tercapai. *Kedua*, anggaran PAD yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Jambi terlalu rendah dan dibawah dari kapasitas dan potensi yang ada di Provinsi Jambi.

Gambar. 3
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2001-2012



3.2.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tingkat efisiensi dimaksudkan untuk menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah. Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang

telah ditetapkan, dalam satuan persen . Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah

atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Pada tabel 6 terlihat bahwa rasio efisiensi pemerintah provinsi Jambi selama tahun 2001-2012 cukup memperhatikan yaitu hanya bergerak di kategori tidak efisien (119 persen) dan kurang

efisien (93 persen). Sepanjang tahun 2001-2009 realisasi belanja daerah selalu melebihi dari anggaran yang ditetapkan, kecuali untuk tahun 2010 2011, dan 2012 sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun persentasenya juga masih tinggi.

Tabel. 7
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2001-2012

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Efisiensi Keuangan	Kategori
2001	230.735.448.000,-	273.678.179.000,-	119	Tidak efisien
2002	282.985.139.000,-	415.163.427.000,-	147	Tidak efisien
2003	413.894.095.000,-	557.768.060.000,-	135	Tidak efisien
2004	453.681.940.800,-	647.532.519.200,-	143	Tidak efisien
2005	732.800.246.800,-	932.483.389.000,-	127	Tidak efisien
2006	959.195.070.200,-	1.144.403.307.000,-	119	Tidak efisien
2007	1.291.600.630.000,-	1.363.592.117.000,-	106	Tidak efisien
2008	1.429.178.038.000,-	1.615.956.992.000,-	113	Tidak efisien
2009	1.620.586.885.000,-	1.670.048.306.000,-	103	Tidak efisien
2010	1.596.391.473.716,-	1.488.130.349.597,-	93	Kurang efisien
2011	1.938.926.763.736,-	1.750.241.856.160,-	90	Kurang efisien
2012	2.765.573.219.873,-	2.558.458.187.655,-	93	Kurang efisien
Rata-rata			109	Tidak efisien

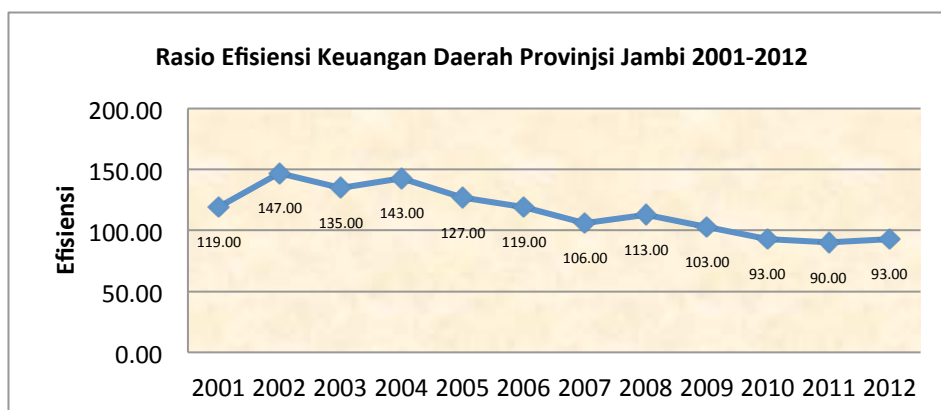
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)

Secara rata-rata selama periode 2001 – 2012 rasio efisiensi keuangan daerah provinsi Jambi mencapai 109 persen (tidak efisien), dikatakan tidak efisien karena rasio rata-ratanya diatas 100 persen. Artinya seluruh anggaran yang tersedia habis dibelanjakan bahkan ada yang melebihi dari total anggaran yang telah ditetapkan dengan kata lain, pemerintah provinsi Jambi cenderung menggunakan seluruh anggaran belanja yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jambi masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Selain itu pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki kecenderungan selalu ingin menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

Gambar 4 memperlihatkan bahwa efisiensi keuangan daerah provinsi Jambi bergerak dari rasio 147 persen s.d 93 persen. Sepanjang tahun 2001-2009 realisasi belanja daerah selalu melebihi dari anggaran yang ditetapkan, kecuali untuk tahun 2010 2011, dan 2012 sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun persentasenya juga masih tinggi yakni 93 persen, 90 persen dan 93 persen.

Kenyataan ini sungguh menggembirakan karena artinya pemerintah provinsi Jambi telah melakukan usaha penghematan anggaran. Diharapkan ke depan pemerintah provinsi Jambi dapat lebih melakukan efisiensi namun tetap memaksimalkan pencapaian tujuan.

Gambar. 4
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2001-2012



3.2.3 Upaya Pajak

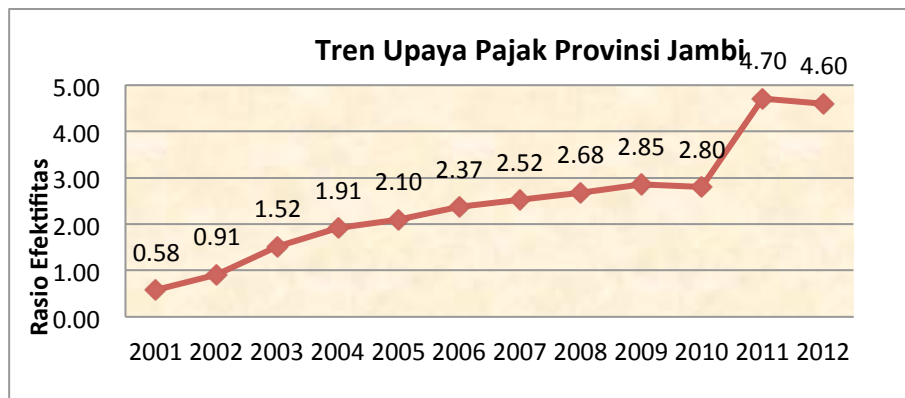
Upaya Pajak (*tax effort*) daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD yang saat ini masih di dominasi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian digunakan juga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk mengetahui kinerja (*performance*) PAD, terutama yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat menggambarkan rasio antara PAD dengan pendapatan masyarakat dalam periode yang sama. Daya pajak (*tax effort*) dapat juga digunakan untuk menganalisis posisi fiskal suatu daerah yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap kapasitas (kemampuan) pajaknya. Suparmoko (dalam Handayani, 2009) mengemukakan bahwa daya pajak adalah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dibandingkan dengan potensi pajaknya (*tax potential*) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari pajak (*tax base*) dikalikan tarifnya.

Membandingkan rasio antara pajak dan potensi antar daerah disebut sebagai prestasi pajak (*tax performance*). Menurut Susanti (dalam Handayani, 2009) menyebutkan bahwa upaya pajak sebagai kemampuan pemerintah mengumpulkan dananya melalui pajak. Dimana upaya pajak merupakan rasio pajak terhadap basis pajak.

Sebagai proksi oleh basis pajak, digunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB). Semakin besar nilai daya pajak (*tax effort*) maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menjangking dananya melalui pajak.

Berdasarkan data pada gambar 5 di bawah ini terlihat bahwa Upaya pajak provinsi Jambi menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni 4,70. Secara rata-rata periode 2001 – 2012 upaya pajak provinsi Jambi hanya 2,46 persen. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Jambi “malas” dalam menggali potensi dan sumber keuangan yang ada di provinsi Jambi. Munculnya kemalasan daerah dalam menggali potensi dan sumber keuangan daerahnya, disebabkan oleh berubahnya fungsi dana perimbangan pusat ke daerah dari fungsi insentif menjadi fungsi pendapatan yang mengakibatkan ketergantungan pada dana perimbangan tersebut. Secara alamiah, memperoleh sesuatu yang gratis (*free*) lebih menarik dibandingkan dengan sesuatu yang harus dicapai dengan kerja keras. Apalagi mengingat jumlah dana perimbangan yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan PAD yang terkumpul dalam periode yang sama. Hal inilah yang menjadikan daerah menjadi malas dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang potensial untuk sumber penerimaan.

Gambar. 5
Tren Upaya Pajak Pemerintah Provinsi Jambi
Tahun 2000-2012



Grafik di atas memperlihatkan trend upaya pajak yang mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun selama periode 2001 – 2012. Trend tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 4,70 persen.

Tabel. 8
Upaya Pajak Provinsi Jambi Tahun 2000-2012

Tahun	Pajak dan Retribusi Daerah		PDRB		Upaya Pajak (%)
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	pertumbuhan	
2001	59.027.757.000,-		10.205.592.000.000,-	—	0,58
2002	97.798.151.000,-	65,68	10.803.423.000.000,-	5,86	0,91
2003	172.719.300.000,-	76,61	11.343.279.544.000,-	5,00	1,52
2004	227.664.371.000,-	31,81	11.953.885.472.000,-	5,38	1,91
2005	264.984.737.300,-	16,39	12.619.972.180.000,-	5,57	2,10
2006	317.218.753.800,-	19,71	13.363.620.730.000,-	5,89	2,37
2007	359.635.801.500,-	13,37	14.275.161.320.000,-	6,82	2,52
2008	409.667.939.600,-	13,91	15.297.770.567.207,-	7,16	2,68
2009	464.242.826.000,-	13,32	16.312.017.019.917,-	6,39	2,85
2010	488.646.887.500,-	5,26	17.465.253.430.000,-	7,31	2,80
2011	849.046.797.588,-	73,75	17.956.446.260.000,-	2,81	4,70
2012	821.661.416.992,-	- 3,22	17.974.885.000.000,-	0,10	4,60
Rata-rata					2,46

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)

4.3 Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kinerja Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Provinsi Jambi

4.3.1 Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan dengan Belanja Modal.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berkaitan dengan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah yang terlihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal. Semakin Tinggi Derajat Desentralisasi Fiskal, maka daerah semakin Mandiri dalam hal keuangan, sebaliknya Derajat Desentralisasi Fiskal yang rendah akan menyebabkan pemerintah daerah semakin tergantung pada pemerintah pusat.

Disamping itu, kemandirian keuangan daerah yang terwakili oleh Derajat Desentralisasi Fiskal akan memperlihatkan pula kemampuan daerah membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah

yang lebih strategis adalah pengeluaran dalam bentuk belanja modal atau dikenal juga sebagai investasi sektor publik. Belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, rumah sakit dan pembangunan fisik lainnya, termasuk juga sarana dan prasarana pemerintahan, baik kantor bupati maupun kantor unit kerja-unit kerja yang ada di daerah.

Dari Tabel 8 di atas dapat dilihat proporsi Belanja Modal Provinsi Jambi dari tahun 2001 – 2012 mengalami fluktuatif yakni berkisar dari 26,69 persen sampai dengan 37,67 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa tahun 2012 pemerintah provinsi Jambi mengalokasikan 26,69 persen dari Total Belanja untuk belanja modal, sedangkan tahun 2008 pemerintah provinsi Jambi mengalokasikan 37,67 persen dari Total belanja.

Tabel. 9
Proporsi Belanja Modal Provinsi Jambi Tahun 2001-2012

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Proporsi Belanja Modal
	Nilai	Nilai	
2001	77.856.628.000,00	273.678.179.000,00	28,45
2002	132.679.745.000,00	415.163.427.000,00	31,96
2003	191.264.763.000,00	557.768.060.000,00	34,29
2004	187.185.890.800,00	654.977.310.900,00	28,58
2005	279.427.573.100,00	772.838.624.200,00	36,16
2006	411.155.247.100,00	1.156.842.788.400,00	35,54
2007	482.080.087.625,00	1.363.592.116.690,00	35,35
2008	608.700.849.540,00	1.615.956.992.043,00	37,67

2009	483.926.717.838,00	1.670.048.305.683,00	28,98
2010	465.860.321.003,00	1.488.130.350.003,00	31,31
2011	518.750.581.050,00	1.750.241.856.160,00	29,64
2012	682.766.683.874,00	2.558.458.187.655,00	26,69

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)

Belanja modal sendiri besar kecilnya ditentukan oleh banyak faktor. Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et al (1994) menyatakan adanya keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh teman empiris yang

sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

Tabel. 10
Hasil Korelasi Rank Spearman Tingkat Kemandirian
Dengan Belanja Modal 2001 – 2012

			MANDIRI	BELANJA
Spearman's rho	MANDIRI	Correlation Coefficient	1.000	.350
		Sig. (2-tailed)	.	.265
		N	12	12
	BELANJA	Correlation Coefficient	.350	1.000
		Sig. (2-tailed)	.265	.
		N	12	12

Hasil olahan SPSS Windows 1.7 di atas menunjukkan hubungan yang positif, tetapi tidak signifikan antara belanja modal dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dikatakan positif adalah karena arahnya yang positif sedangkan tidak signifikan karena signifikannya yang terlalu tinggi yaitu 0,265 (two tailed) lebih dari 0,1.

Hal ini dapat dimaknai bahwa tidak signifikan hubungan tersebut disebabkan hasil rata – rata Derajat Desentralisasi Fiskal provinsi Jambi adalah 37,40 % dengan kategori cukup. Berarti untuk membiayai modal diperlukan Derajat Desentralisasi Fiskal yang lebih tinggi atau kemandirian keuangan daerah yang lebih besar yang tergambar pada kategori Derajat Desentralisasi Fiskal minimal baik (≥ 50 persen). Artinya kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan pendapatan harus diatas 50%

sehingga mampu membiayai belanja modal lebih besar lagi.

4.3.2 Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dengan Belanja Modal

Kinerja keuangan daerah provinsi Jambi periode 2001 – 2012 yang diwakili oleh rasio efisiensi adalah tidak efisien. Tabel 11 dibawah ini memeprihat hasil Pengujian korelasi Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Olahan SPSS 1.7 for Windows menunjukkan hasil bahwa hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja keuangan daerah yang diwakili oleh rasio efisiensi menunjukkan arah negatif sebesar (- 793), dengan signifikansi pada α 0,01 (1%).

Tabel. 11
Hasil Korelasi Rank Spearman Tingkat Kemandirian
Dengan Belanja Modal 2001 – 2012

			BELANJA	KINERJA
Spearman's rho	BELANJA	Correlation Coefficient	1.000	-.793(**)
		Sig. (2-tailed)	.	.002
		N	12	12
	KINERJA	Correlation Coefficient	-.793(**)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.002	.
		N	12	12

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ini berarti bahwa hubungan antara kinerja keuangan dengan Belanja Modal signifikan tetapi arahnya negatif. Hubungan signifikan dan arah negatif dapat dimaknai semakin tinggi nilai kinerja keuangan daerah yang diwakili oleh rasio efisiensi maka semakin tidak baik kondisi kinerja keuangan tersebut, karena rasio tingkat efisiensi yang tinggi ($\geq 100\%$) merupakan kategori efisien keuangan yang tidak efisien. Tidak efisien disebabkan oleh sebagian besar dari Total Anggaran belanja digunakan untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) sehingga alokasi untuk belanja modal menjadi kecil. Untuk itu agar alokasi belanja modal meningkat maka diperlukan upaya meningkatkan efisiensi atau rasio efisien yang angkanya kecil ($> 60\%$).

4.4. Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian

1. Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah (DDF) dapat dilakukan dengan peningkatan PAD melalui:
 - a. Pajak dan retribusi
Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 peningkatan yang dapat dilakukan adalah Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui penambahan wajib pajak dan retribusi daerah, karena penambahan objek pajak dan retribusi serta peningkatan tarif tidak memungkinkan lagi.
 - b. Laba BUMD
Saat ini Badan Usaha Milik Daerah yang menghasilkan keuntungan hanya Bank Jambi, sedangkan BUMD yang lainnya merugi seperti PT. Jambi Indoguna Internasional. Oleh karena itu diperlukan Rasionalisasi dan Restrukturisasi BUMD agar dapat meningkatkan laba dan PAD bagi Provinsi Jambi.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah
Optimalisasi Penggunaan asset daerah melalui penyewaan asset dan Pemanfaatan asset pemerintah daerah dengan swasta dalam bentuk BOT (*Built Operation Transfer*)
2. Kinerja keuangan pemerintah provinsi Jambi yang diwakili oleh Efisiensi Efektifitas serta Upaya Pajak, hanya efisiensi yang belum tercapai, khususnya dalam belanja tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengefisienkan penggunaan belanja langsung maupun tidak langsung khususnya belanja pegawai. Minimal alokasi belanja tidak langsung sebesar 60% dan biaya langsung sebesar 40%. Oleh karena itu belanja pegawai harus diupayakan minimalisasi melalui program optimalisasi pegawai. Ini berarti penambahan pegawai tidak boleh dilakukan, agar besaran belanja langsung tidak meningkat.
3. Untuk meningkatkan belanja modal maka diperlukan peningkatan efisiensi belanja tidak langsung agar besaran alokasi untuk belanja modal meningkat dan berdampak terhadap pembangunan daerah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan didukung dengan teori serta pembahasan pada bab terdahulu, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa simpulan, dan saran berkaitan dengan penelitian.

4.1 Simpulan

1. Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Provinsi Jambi sejak tahun 2001-2012 berdasarkan ratio PAD terhadap total pendapatan daerah, secara rata-rata adalah sebesar 37,40% dengan kategori cukup.
2. Kinerja Keuangan daerah pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2001-2012 yang terlihat dari:
 - a. Efektifitas keuangan provinsi Jambi sejak tahun 2001-2012 termasuk ke dalam kategori SANGAT EFEKTIF dengan rata-rata 121,58%.
 - b. Efisiensi keuangan provinsi Jambi sejak tahun 2001-2012 termasuk ke dalam kategori TIDAK EFISIEN dengan rata-rata 109%.
 - c. Upaya pajak provinsi Jambi sejak tahun 2001-2012 terus mengalami peningkatan namun masih tergolong RENDAH. Rata-rata daya pajak provinsi Jambi sejak tahun 2001-2012 hanya 2,46% artinya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB hanya 2,46 persen.
3. Kemandirian daerah berhubungan tidak signifikan dengan belanja modal, sedangkan kinerja keuangan daerah berhubungan signifikan dengan belanja modal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas maka dapat disarankan kepada pemerintah provinsi Jambi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan intensifikasi Wajib pajak dan Retribusi daerah, peningkatan laba BUMD dan optimalisasi pemanfaatan asset. Disamping itu peningkatan PAD juga dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan administrator (SDM) dengan berbagai macam jalur pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan basis pajak daerah yaitu melalui reformasi fiskal pemerintah Indonesia dimana pajak properti merupakan hal yang tepat

untuk langkah tersebut; meluruskan administrasi kota; merestrukturisasi kesulitan BUMD dan instansi layanan publik pemerintah lainnya agar lebih *Profitable* dan meningkatkan *cost recovery* untuk pelayanan sehingga dapat membantu Peningkatan PAD dan membangun mekanisme keuangan provinsi Jambi yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas pajak melalui pemungutan pajak air bawah tanah dan air permukaan, alat angkutan air dan BBN kendaraan di atas air.

3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pada belanja daerah maka diperlukan upaya menekan biaya langsung khusus belanja pegawai melalui, penetapan moratorium penambahan jumlah pegawai atau memberlakukan zero growth agar belanja pegawai tidak meningkat.
4. Guna meningkatkan alokasi belanja modal maka diperlukan peningkatan efisiensi, khususnya pada belanja tidak langsung. Disamping itu efisiensi juga dapat dilakukan terhadap belanja langsung khususnya belanja pegawai.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah Syukriy dan Halim Abdullah, (2006) *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No.2 halaman 17-32
- Adi,Priyo Hari (2007),*Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*, Artikel pada Accounting Conference di Universitas Indonesia.
- Azhar, Mhd Karya Satya (2008), *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah kab /Kota sebelum dan sesudah otonomi daerah*, Tesis. Medan
- Bastian,Indra,(2001) *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE, UGM Yogyakarta,
- Bratakusumah, Deddi Supriadi dan Solihin, Dadang, (2001): *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia, Jakarta.
- Dajan, Anto (1986), *Pengantar Metode Statistik*, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris).UI-Press, Jakarta.
- Elmi, Drajat (2002) “ *Peningkatan Penerimaan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*” Majalah Perencanaan Pembangunan No.6, 36-43.
- Ekawarna, Shita Unjawati., Sam, Iskandar., Rahayu, Sri (2009). *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi. Jambi.
- Gujarati, Damodar (1995), *Ekonometrika Dasar Edisi Bahasa Indonesia*, Alih Bahasa Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ghozali, Imam (2005), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul (2004), *Akuntansi Sektor Publik “ Akuntansi Keuangan Daerah”*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul (2007), “*Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*”,UPP STIM YKPN Yogyakarta Edisi Revisi, Seri Bunga Rampai, Manajemen Keuangan Daerah.
- _____ (2008). *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik- Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hidayat,Paidi, Ario Pratomo, Wahyu, Agus Harjito,D : *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten /Kota Pemekaran di Sumatera Utara*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No.3 Desember (2007), hal 213-222.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayati. W, Jaya. W.K, Purwanto.B.M, Halim.A, Suprihanto. J, Purnomo. A.B, (1994).“ *Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD*”. Laporan Penelitian. KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo (2000), *Metode Penelitian Bisnis*, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), Jogjakarta
- Kaho,Yosef Riwu, (2001), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karo-Karo, Syukur Selamat (2006), *Hubungan Belanja Modal Operasional dan Pemeliharaan pada pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa* Program Magister-Sains Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Tesis.
- Mahmudi, (2009), *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Nugroho, Fajar., Rohman, Abdul (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli sebagai Variabel Intervening*, Juornal of Accounting Vol. 1 No. 2 Tahun 2012 halaman 1-14.
- Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Radianto,(2007).*Studi Kebutuhan Kuantitas dan Kualitas SDM untuk Sektor-sektor Unggulan di Kapet Seram – Maluku*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.10 nomor 1 BPFE, Yogyakarta.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi,(2009). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik” Volume 10 Nomor 1 hal 1883 – 1899.

Sularso, Havid.,Restianto, Yanuar E (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No.2 Agustus 2011.